

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan berawal dari tahap perencanaan yang menjadi landasan sekaligus pemandu arah pembangunan guna mencapai tujuannya. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yakni menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Disamping itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngaringan. Tahap ini dilakukan dengan:
 - a. membentuk Tim Penyusun Renja Kecamatan Ngaringan;
 - b. melaksanakan orientasi mengenai Renja untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renja Kecamatan Ngaringan;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan sebagai panduan kerja; dan
 - d. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renja Kecamatan Ngaringan.

2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Ngaringan
Pada tahap ini dilakukan analisis gambaran pelayanan Kecamatan Ngaringan dan mengevaluasi capaian Renja Kecamatan Ngaringan tahun yang lalu.
3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Ngaringan.
Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal Renja Kecamatan Ngaringan, yang mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Grobogan. Penyempurnaan tersebut mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran.
4. Pelaksanaan Forum Lintas Sektoral.
Tahap ini merupakan koordinasi antar Unit Kerja yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Kecamatan Ngaringan.
5. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Ngaringan.
Tahap ini dilakukan dalam rangka mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan akhir Renja Kecamatan Ngaringan disusun dengan sistematika:
 - I. Pendahuluan
 - II. Hasil evaluasi Renja Tahun lalu
 - III. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
 - IV. Rencana kerja dan pendanaan
 - V. Penutup
6. Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Ngaringan.
Rancangan akhir Rencana Kerja disampaikan oleh Bappeda Kabupaten Grobogan kepada Bupati Grobogan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Grobogan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Ngaringan Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun

- 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);

1.3. Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

Rancangan Awal Renja Kecamatan Ngaringan disusun sebagai dokumen awal yang selanjutnya akan disempurnakan lagi menjadi rancangan renja dan renja yang menjadi pedoman dan arah bagi Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Ngaringan.

- **Tujuan**

Rancangan Awal Renja Kecamatan Ngaringan disusun agar tujuan dan sasaran Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan tahun 2024 dapat dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022

Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan pada struktur anggarannya memiliki 2 program dan 7 kegiatan serta 19 Sub kegiatan, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
 - 1) Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - 7) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT
DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2022
KECAMATAN NGARINGAN KABUPATEN GROBOGAN

No	Kode	Program/Kegiatan	Satuan	TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2021				TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022						REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022				Pelaksana
				Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tujuan - Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan			Nilai IKM	83,88	2,885,155,000,-	94,40	1.807.049.498,-	100	2.626.525.000,-	96,96	2.546.631.005,-	96,96	2.546.631.005,-	96,96	2.546.631.005,-	96,96	2.546.631.005,-	
Sasaran-1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat			Nilai IKM	83,88	2,885,155,000,-	94,40	1.807.049.498,-	100	2.626.525.000,-	96,96	2.546.631.005,-	96,96	2.546.631.005,-	96,96	2.546.631.005,-	96,96	2.546.631.005,-	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai	73,5	2,885,155,000,-	94,40	1.807.049.498,-	100	2.626.525.000,-	96,96	2.546.631.005,-	96,96	2.546.631.005,-	96,96	2.546.631.005,-	96,96	2.546.631.005,-	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	35.000.000,-	100	22.920.000,-	100	35.000.000,-	99,79	34.925.000,-	99,79	34.925.000,-	99,79	34.925.000,-	99,79	34.925.000,-	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	35.000.000,-	100	22.920.000,-	1	35.000.000,-	99,79	34.925.000,-	99,79	34.925.000,-	99,79	34.925.000,-	99,79	34.925.000,-	PMD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	2.091.197.000,-	94,48	1.117.245.946,-	100	1.917.500.000,-	97,09	1.861.739.010,-	97,09	1.861.739.010,-	97,09	1.861.739.010,-	97,09	1.861.739.010,-	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	2.073.157.000,-	94,48	1.117.245.946,-	14	1.917.500.000,-	97,09	1.861.739.010,-	97,09	1.861.739.010,-	97,09	1.861.739.010,-	97,09	1.861.739.010,-	Subbag Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	12	8.040.000,-	100	8.040.000,-	12	8.040.000,-	100	8.040.000,-	100	8.040.000,-	100	8.040.000,-	100	8.040.000,-	Subbag Keuangan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	dokumen	12	10.000.000,-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	88.350.000,-	100	78.440.000,-	100	88.362.000,-	100	82.086.085,-	100	82.086.085,-	100	82.086.085,-	100	82.086.085,-	

No	Kode	Program/Kegiatan	Satuan	TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2021				TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022						REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022				Pelaksana
				Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	stel	30	28,350,000,-	100	28,350,000,-	30	28.362.000,-	100	28.362.000,-	100	28.362.000,-	100	28.362.000,-	100	28.362.000,-	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Bimbingan Teknis mplementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	30	60.000.000,-	98,04	50.090.000,-	30	60.000.000,-	89,54	53.724.085	89,54	53.724.085	89,54	53.724.085	89,54	53.724.085	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	244,838,000,-	100	224.383.500,-	100	227.663.000,-	95,79	218.071.710,-	95,79	218.071.710,-	95,79	218.071.710,-	95,79	218.071.710,-	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	unit	35	8.000.000,-	100	7.000.000,-	100	7.000.000,-	100	7.000.000,-	100	7.000.000,-	100	7.000.000,-	100	7.000.000,-	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	10	101,408,000,-	99,50	100.896.500,-	100	53.563.000,-	97,32	52.126.710,-	97,32	52.126.710,-	97,32	52.126.710,-	97,32	52.126.710,-	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	unit	20	32,200,000,-	98,01	27.640.000,-	100	50,000,000,-	99,92	49.960.000,-	99,92	49.960.000,-	99,92	49.960.000,-	99,92	49.960.000,-	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	unit	10	10,000,000,-	99,93	8.993.950,-	100	9,000,000,-	91,67	8.250.000,-	91,67	8.250.000,-	91,67	8.250.000,-	91,67	8.250.000,-	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	unit	12	2.100.000,-	100	2.100.000,-	12	2.100.000,-	100	2.100.000,-	100	2.100.000,-	100	2.100.000,-	100	2.100.000,-	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan/ Material	unit	20	15,500,000,-	100	20.672.000,-	100	15,000,000,-	100	15,000,000,-	100	15,000,000,-	100	15,000,000,-	100	15,000,000,-	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	40	79,330,000,-	83,29	66.075.000,-	100	91.000.000,-	91,91	83.635.000,-	91,91	83.635.000,-	91,91	83.635.000,-	91,91	83.635.000,-	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	160,040,000,-	100	130.051.102,-	100	144.000.000,-	95,03	136.849.312,-	95,03	136.849.312,-	95,03	136.849.312,-	95,03	136.849.312,-	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	70,000,000,-	88,55	61.985.000,-	12	70,000,000,-	96,69	67.680.000,-	96,69	67.680.000,-	96,69	67.680.000,-	96,69	67.680.000,-	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	41,000,000,-	59,06	24.215.852,-	12	28,000,000,-	86,16	24.124.312,-	86,16	24.124.312,-	86,16	24.124.312,-	86,16	24.124.312,-	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	9,000,000,-	99,69	8.972.000,-	12	8,000,000,-	88,06	7.045.000,-	88,06	7.045.000,-	88,06	7.045.000,-	88,06	7.045.000,-	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	38,040,000,-	99,54	34.878.250,-	12	38.000.000,-	100	38.000.000,-	100	38.000.000,-	100	38.000.000,-	100	38.000.000,-	Subbag Umum dan Kepegawaian

No	Kode	Program/Kegiatan	Satuan	TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2021				TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022						REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN RENSTRA HINGGA 31/12/2022				Pelaksana
				Target Kinerja Capaian (Renstra SKPD) Tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2021		Target Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Capaian Program Renja SKPD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	236,258,000,-	100	225.015.000,-	100	214.000.000,-	100	213.959.888,-	100	213.959.888,-	100	213.959.888,-	100	213.959.888,-	
		Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	6	36,258,000,-	99,99	26.583.000,-	6	25.00.000,-	97,08	24.268.888,-	97,08	24.268.888,-	97,08	24.268.888,-	97,08	24.268.888,-	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	1	200,000,000,-	99,22	198.432.000,-	1	189.000.000,-	99,84	188.691.000,-	99,84	188.691.000,-	99,84	188.691.000,-	99,84	188.691.000,-	Subbag Umum dan Kepegawaian
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	bulan	12	20.00.000,-	1	-	12		12		12		12		12		
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	bulan	12	20.00.000,-	1	-	12		12		12		12		12		
		7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	kegiatan	1	20.00.000,-	1	-	1		1		1		1		1		Kasi Trantibum
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	bulan	12	11.00.000,-	1	-	12	-	12	-							-
		7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	bulan	12	11.00.000,-	1	-	12	-	12	-							-
		7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	kegiatan	1	11.00.000,-	1	-	1	-	1	-							-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngaringan

Sesuai dengan Keputusan Camat Ngaringan Nomor: Tahun 2022 Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan memiliki 2 IKU (Indikator Kinerja Utama), yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Capaian kinerja indikator sasaran tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN NGARINGAN KABUPATEN GROBOGAN

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan Ngaringan	B	B (76,70)	B (77,20)	B (77,70)	B (78,70)	B (79,70)	B (85,00)	BB (88,75)	BB (88,76)	BB (88,77)
2	Nilai Sakip Kecamatan Ngaringan	B	B (65,00)	B (68,00)	BB (70,00)	BB (72,00)	BB (73,50)	B	B	B (82,70)	B (82,99)

Realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Realisasi perolehan skor SAKIP Pemda tahun 2021 dengan kategori B diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas tingkat akuntabilitas /pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*)..

Nilai evaluasi dikelompokkan dalam skor/skala prestasi capaian kinerja sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan , memimpin perubahan, pekerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	> 70 - 80	Sangat baik , akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal
4	B	> 60 - 70	Baik , akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan atau perlu sedikit perbaikan.
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai) , akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	> 30 - 50	Kurang , sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistim untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	> 0 - 30	Sangat Kurang , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerpapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sebagai perbandingan kami tampilkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2019 dan 2020 dengan predikat B yang menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan

pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah menunjukkan hasil yang baik namun masih tetap memerlukan perbaikan.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

			Nilai	Nilai
Komponen yang dinilai			tahun	tahun
			2019	2020
A	Perencanaan Kinerja	30	20,62	21,00
B	Pengukuran Kinerja	25	16,57	16,62
C	Pelaporan Kinerja	15	9,36	9,52
D	Evaluasi Internal	10	6,06	6,16
E	Capaian Kinerja	20	8,26	9,11
Nilai Hasil Evaluasi		100	60,87	62,41
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Sedangkan untuk kecamatan Ngaringan bersama 18 kecamatan lainnya untuk saat ini belum dinilai oleh Kabupaten sehingga belum bisa mengisi capaian nilai/skor penilaian SAKIP dari Kabupaten. Namun upaya memperbaiki kinerja pelayanan di jajaran kecamatan Ngaringan telah dilakukan dalam rangka bentuk tanggung jawab ikut menyukseskan agenda reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan diantaranya adalah :

- 1) Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) ;
- 2) Secara rutin dilakukan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam rentang waktu triwulanan dan tahunan;
- 3) Adanya penilaian setiap tahun dari Kementerian Dalam Negeri terhadap SAKIP Pemda telah memacu seluruh stakeholder SAKIP untuk terus berbenah dalam rangka menuju *result oriented goverment*.

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai SAKIP ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyampaian data dukung dari masing-masing seksi dan subbag sedikit terlambat; dan
- 2) Belum adanya aplikasi yang integrated antara keuangan dan kinerja agar memudahkan proses dari sejak perencanaan hingga pelaporannya.

- b. Nilai /skor survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public yang telah dilakukan oleh Pemda merupakan skor survey yang diperoleh oleh OPD yang menjadi obyek pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

Indikator ini pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 82,7 sementara realisasinya sebesar 88,75 melampaui target yang telah ditetapkan.

- Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pencapaian target nilai kepuasan masyarakat secara terukur dan konsisten;
 - 2) Melakukan sosialisasi optimalisasi pelayanan publik; dan
 - 3) Komitmen kepala dan personil unit kerja yang kuat.
- Faktor penghambat dalam pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Belum adanya mekanisme reward and punishment yang baku untuk memacu percepatan peningkatan kualitas pelayanan public di jajaran pemerintah kabupaten Grobogan; dan
 - 2) Pelaksanaan survey masih bersifat sampel dan belum seluruh masyarakat yang dilayani ikut berpartisipasi.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ngaringan

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Ngaringan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Sekretariat

- 1) Kurangnya jumlah Personil dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
- 2) Kurang memadainya sarana prasarana yang mendukung kegiatan di Kecamatan
- 3) Kurangnya kompetensi yang dimiliki personil dalam menjalankan tugas dan fungsi
- 4) masih kurangnya pengelolaan data dan pengarsipan dokumen

b. Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) menurunnya kesadaran gotong-royong masyarakat
- 2) keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa

c. Permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Kurangnya Kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah
- 2) Kurangnya kelengkapan sarana pendukung dalam operasional penegakan Peraturan Daerah
- 3) Kurangnya peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan anggota Satlinmas yang ada di Masyarakat

d. Permasalahan Kesejahteraan Rakyat

- 1) kurangnya Koordinasi dalam penyediaan data Kesejahteraan Sosial

e. Permasalahan Seksi Pelayanan Umum

- 1) Belum optimalnya penerapan SOP maupun SPP dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Kurangnya sarana pendukung yang responsif terhadap perempuan, lansia, dan difabel

f. Permasalahan Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Kurangnya sosialisasi kepada Perangkat Desa terkait penyusunan APBDes dan Laporan Petanggungjawaban APBDes
- 2) Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa dalam intensifikasi PBB

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka isu-isu strategis Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan dapat dibagi menjadi beberapa isu utama, yaitu:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
 - a. Belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung.
 - b. Kurangnya personel menjadikan banyaknya fungsi yang dirangkap sehingga output kinerja juga kurang maksimal.
 - c. Perlunya integrasi system dan data.
 - d. Koordinasi antar fungsi masih perlu ditingkatkan lagi.
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
 - a. Belum Optimalnya verifikasi dan SPI (Sistem Pengendalian Internal).
 - b. Belum semua unit memahami sistem pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan.

3. Isu terkait pelayanan publik.
 - a. Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara menyeluruh (komprehensif) di semua unit pelayanan.
 - b. Masih perlunya sosialisasi kepada masyarakat maupun ASN terkait hak dan kewajiban masing-masing dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan adalah Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Ngaringan
Kab.Grobogan

No		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Rancangan Awal RKPD 2024		Hasil Analisis Kebutuhan 2024	
					Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
						Rp		Rp
1		2	3	4	5	6	7	8
1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	70	2.536.979.548,-	70	2.536.979.548,-
			Laporan Keuangan Sesuai SAP	%	100		100	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	%	100		100	
			Presentase Pemenuhan Area Penilaian Manejemen Resiko	%	60		60	
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%	100	40.000.000,-	100	40.000.000,-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Musrenbangcam yang tersusun		1	40.000.000,-	1	40.000.000,-
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	1.729.529.548,-	100	1.729.529.548,-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	bulan	14	1.713.449.548,-	14	1.713.449.548,-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	12	16.080.000,-	12	16.080.000,-
	1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	%	100	128.350.000,-	100	128.350.000,-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel	30	28.350.000,-	30	28.350.000,-
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	30	100.000.000,-	30	100.000.000,-
	1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	265.100.000,-	100	265.100.000,-
		Penyediaan Instalasi Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	unit	35	9.000.000,-	35	9.000.000,-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	10	100.000.000,-	10	100.000.000,-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	unit	20	35.000.000,-	20	35.000.000,-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	unit	10	9.000.000,-	10	9.000.000,-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	unit	12	2.100.000,-	12	2.100.000,-
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	unit	20	20.000.000,-	20	20.000.000,-

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	40	90.000.000,-	40	90.000.000,-
	1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	164.000.000,-	100	164.000.000,-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	bulan	12	80.000.000,-	12	80.000.000,-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	35.000.000,-	12	35.000.000,-
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	9.000.000,-	12	9.000.000,-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	40.000.000,-	12	40.000.000,-
	1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	185.000.000,-	100	185.000.000,-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	unit	6	35.000.000,-	6	35.000.000,-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpeliharaan	unit	1	150.000.000,-	1	150.000.000,-
2		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	bulan	12	25.000.000,-	12	25.000.000,-
	5.1	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	bulan	12	25.000.000,-	12	25.000.000,-
		7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	kegiatan	1	25.000.000,-	1	25.000.000,-
						2.536.979.548,-		2.536.979.548,-

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Usulan Khusus

Pada tahun 2024 terdapat usulan khusus Pembagunan Kantor Kecamatan Ngaringan yang baru di lahan milik Kecamatan Ngaringan yang berlokasi Dusun Krajan Rt.03/ Rw.01 Desa Ngaringan Kecamatan Ngaringan, lebih representative sekaligus dan tidak kebanjiran.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan yang menjadi Acuan/Pedoman

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah pada tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2024 yaitu: **“Penguatan daya saing SDM, didukung peningkatan reformasi birokrasi”**. Pembangunan tetap berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Penguatan tata kelola pemerintahan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dijadikan prioritas, selain tetap meneruskan pembangunan infrastruktur. Penguatan reformasi birokrasi menegdepankan pada pencapaian sasaran-sasaran yang ada, yakni akuntabilitas, kapabilitas dan pelayanan prima. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas perencanaan, penanggran dan pengawasan, peningkatan kompetensi ASN, serta meningkatkan mutu pelayanan publik didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini meliputi:

- 1) Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat
- 3) Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care)
- 4) Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana

- 6) Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada
- 7) Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima
- 8) Pengembangan smart government dalam menunjang pengembangan smart city.
- 9) Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan
- 10) Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN

Sedangkan bila dilihat dari sasaran pembangunan Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagaimana teruraikan dalam table 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,34 tahun
		Rata-rata lama Sekolah	7,04 tahun
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	75,14 tahun
3	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	Tingkat Capaian APE	Madya (0,6375 – 0,7724)
4	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik	87,22%
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	92,34%
		Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	76,07 %
		Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	B (0,20- 0,44)
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	Indeks Kualitas Air	Indeks 80,10
		Indeks Kualitas Udara	Indeks 87,15
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks 62,75
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks 46,00

6	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks 0,68
7	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,23 %/tahun
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	0,5 %/tahun
		Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	1,59 %/tahun
		Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	1,47 persen
8	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	Nilai investasi di daerah	870,467 Milyar Rupiah
9	menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	Indeks Desa Membangun	Indeks 0,70
10	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PPKS	1,4 %/tahun
11	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,2 %
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	Rata-rata nilai IKM	Kategori B (77,70)
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks Sangat Inovatif
13	Meningkatnya penerapan egovernment yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks 3,3
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	Nilai SAKIP	Nilai B (70)
		Level Maturitas SPIP	Level 3 (3,1)
		Opini BPK	Opini WTP
		Indeks sistem merit	Kategori III (250)

13	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	73,85 %
14	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	Persentase Toleransi antar umat beragama	100%
		Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	100%

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ngaringan

3.2.1. Tujuan

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Kecamatan Ngaringan dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Kecamatan Ngaringan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian, Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan maka tujuan Renja Kecamatan Ngaringan tahun 2024 adalah :

“ Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan ”

3.2.2. Sasaran

Berpedoman pada sasaran dalam Renstra Kecamatan Ngaringan dan menyesuaikan dengan aturan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sasaran Renja Kecamatan Ngaringan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	Nilai B (77,70)
2	Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP (Penilaian tim Kabupaten)	BB (70)

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Penjabaran Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Pada tahun 2024 dengan berpedoman pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kecamatan Ngaringan akan melaksanakan 6 program, 17 kegiatan, dan 72 sub kegiatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju 2024

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- A. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
 - a) Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- B. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- d) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f) Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material
- g) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b) Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - c) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - d) Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - e) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Ngaringan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan
Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2023 dan Prakiraan Maju 2024
Kecamatan Ngaringan

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						targ et	Rp	targ et	Rp
KECAMATAN NGARINGAN									2.536.979.548
Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat		Nilai IKM			82,99		83,29	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	68		70	2.536.979.548
			Laporan Keuangan Sesuai SAP		%	100		100	
			Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah		%	100		100	
			Presentase Pemenuhan Area Penilaian Manajemen Resiko		%	40		60	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						targ et	Rp	targ et	Rp
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	%	100	1.721.489.548	100	1.729.529.548
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN		bulan	14	1.713.449.548	14	1.713.449.548
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		dokumen	12	8.040.000	12	16.080.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100	%	100	118.340.000	100	128.350.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		stel	30	28.350.000	30	28.350.000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		orang	30	89.990.000	30	100.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang	%	100	204.514.000	100	265.100.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
				terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		unit	35	7.500.000	35	9.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		unit	10	60.914.000	10	100.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		unit	20	30.000.000	20	35.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		unit	10	9.000.000	10	9.000.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		unit	12	2.100.000	12	2.100.000
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan		unit	20	15.000.000	20	20.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		kali	40	80.000.000	40	90.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%	100	153.074.000	100	164.000.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia		bulan	12	80.000.000	12	80.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						target	Rp	target	Rp
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		bulan	12	29.600.000	12	35.000.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		bulan	12	7.000.000	12	9.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor		bulan	12	36..474.000	12	40.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	%	100	132.331.800	100	185.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara		unit	6	27.258.000	6	35.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara		unit	1	105.073.000	1	150.000.000
		7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali	bulan	12	20.000.000	12	25.000.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Anggaran Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024	
						targ et	Rp	targ et	Rp
				100					
		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100	bulan	12	20.000.000	12	25.000.000
		7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		kegiatan	1	20.000.000	1	25.000.000

BAB V

PENUTUP

2.1. Catatan Penting

Rancangan Awal Rencana Kerja adalah dokumen awal perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rancangan Awal Renja Kecamatan Ngaringan Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Ngaringan tahun 2021-2026.

Rancangan Awal Renja Kecamatan Ngaringan Tahun 2023 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja program kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2024 Renja Kecamatan Ngaringan terdiri dari 2 program dan 7 kegiatan serta 19 Sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 9.251.655.200 (Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).

Rancangan Awal Renja Kecamatan Ngaringan Tahun 2024 selanjutnya menjadi pedoman awal yang pada tahapan selanjutnya akan disempurnakan lagi menjadi Rancangan Renja dan terakhir menjadi Renja yang bermanfaat bagi Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

2.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

2.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan yang telah ditetapkan pada tahun 2024 maka perlu

didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

CAMAT NGARINGAN

WIDODO JOKO NUGROHO,S.STP
NIP.19781109 199711 1 002